

**PENGARUH STRUKUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL
INTELEKTUAL PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2015-2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Amalia
NPM : 1505170467
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : AMALIA
N P M : 1505170467
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, SE., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, SE., MM

Pembimbing

SRI RAHAYU, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris



ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : AMALIA
N.P.M : 1505170467
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SRI RAHAYU., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURL., SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AMALIA
N.P.M : 1505170467
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017

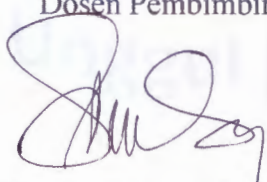
Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/10/2019	Pembahasan lebih lengkap	}	
2	Penulisan dan format caran		
	sebagai buku panduan prodi Akuntansi		
18/10/2019	abstraksi	}	
2	bagi penulisan dan bapal		
	basis bapal.		
22/10/2019	Capaian hasil SPSS	}	
2	dan analisis di bagian		
28/10/2019	Selesai bimbingan	}	
2	Skripsi		

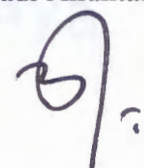
Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing


(SRI RAHAYU, SE., M.Si)


(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AMALIA
NPM : 1505170467
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 29 Desember 2018
Pembuat Pernyataan



AMALIA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

AMALIA, NPM 1505170467, Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. Medan, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan modal intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit digunakan sebagai variabel independen. Pengungkapan modal intelektual digunakan dalam penelitian ini menggunakan *ICD Index* sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2017. Sampel berjumlah 11 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual; Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual; dan Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Selanjutnya secara simultan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kata Kunci : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Pengungkapan modal intelektual (*ICD Index*)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang masih memberikan berbagai nikmat yang tak dapat diukur dengan satuan unit maupun moneter sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis berupaya dengan segala kemampuan dan telah berusaha sepenuhnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini namun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan-masukan berupa kritikan ataupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Nizamuddin dan Ibunda Zubaidah tercinta serta Kakak Abang dan Adik-adik sebagai sumber motivasi kehidupan penulis yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.

2. Abangda Ahmad Salim, Mami Salma dan Pak Muid yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta bantuan dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis.
3. Ibu Sri Rahayu., SE., M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh teman-teman yang penulis cintai terkhususnya Sahrul Evendi, Satria Refdi Ardiguna, Nofi sari, Nela aisyah, Eva trimadani, Heni rangga, Alya adressina, Widya Novita, Mhd Khairul Fadli dan Muhammad Rendi serta teman-teman seperjuangan penulis yang berada di kelas G Akuntansi Pagi yang sama-sama menjalankan proses perkuliahan dengan penuh suka cita.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi diri pribadi penulis dan pembaca. Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis

AMALIA
NPM :1505170467

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
A. Uraian Teori.....	10
1. Modal Intelektual	10
a. Pengertian Modal Intelektual	10
b. Komponen Modal Intelektual	11
c. Pengungkapan Modal Intelektual.....	12
2. <i>Corporate Governance</i>	15
a. Definisi <i>Corporate Governance</i>	15
b. Konsep <i>Corporate Governance</i>	16
c. Struktur <i>Corporate Governance</i>	19
1. Dewan Komisaris	
2. Dewan Direksi.....	

3. Komite Audit.....	
d. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	23
e. Faktor-faktor <i>Corporate Governance</i>	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Analisis Statistik Dekriptif.....	46
2. Uji Asumsi Klasik.....	54
a. Uji Normalitas.....	54
b. Uji Multikolinearitas	54
c. Uji Autokorelasi	55
d. Uji Heteroskedastisitas.....	56
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4. Uji Hipotesis	59

5. Koefisien Determinasi (R^2).....	62
B. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL II.1 Penelitian Terdahulu.....	26
TABEL III.1 Item Pengungkapan Modal Intelektual	34
TABEL III.2 Waktu Penelitian	37
TABEL III.3 Daftar Perusahaan yang menjadi sampel	39
TABEL IV.1 Indeks Pengungkapan Modal Intelektual	47
TABEL IV.2 Dewan Komisaris	48
TABEL IV.3 Dewan Direksi.....	49
TABEL IV.4 Komite Audit	51
TABEL IV.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
TABEL IV.6 Hasil Uji Multikolinearitas	55
TABEL IV.7 Hasil Uji Autokorelasi	56
TABEL IV.8 Hasil Uji Regresi Berganda.....	58
TABEL IV.9 Hasil Uji F	61
TABEL IV.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	54
Gambar IV.2 Grafik <i>Scatterplot</i>	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perekonomian dunia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, persaingan yang ketat, pertumbuhan inovasi yang luar biasa yang mengakibatkan setiap perusahaan harus mengubah strategi bisnisnya.

Menurut Kuryanto (2008) perusahaan kini harus merubah strategi bisnisnya dari bisnis berdasarkan tenaga kerja (*labor based business*) ke bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Perusahaan yang berbasis pengetahuan menerapkan konsep manajemen pengetahuan yang bertugas mencari informasi mengenai bagaimana cara memilih, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agar efisien. Perhatian khusus perusahaan terhadap modal intelektual menjadi solusi tepat untuk menjawab masalah tersebut. Modal intelektual didefinisikan sebagai semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Peran strategis modal intelektual yaitu sebagai suatu potensi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lainnya ataupun sulit untuk ditiru oleh perusahaan pesaing lainnya. Sumber daya intelektual dengan segala pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya mampu mengantisipasi dan menyesuaikan segala bentuk ketidakpastian situasi yang dapat mengancam eksistensi perusahaan. Kondisi tersebut dapat bemanfaat untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penciptaan

laba, *strategic positioning* (pangsa pasar, kepemimpinan, dan reputasi), inovasi teknologi, loyalitas pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas (Wahyu, 2009).

Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan disajikan dalam laporan tahunan. Hal tersebut didukung regulasi di Indonesia yaitu Bapepam Kep134/BL/2006 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan bagi emitmen dan perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang diantaranya menguraikan secara singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan lebih banyak memberikan informasi dan dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi.

Selain itu, wacana yang sering dihadapi mengenai modal intelektual yaitu bagaimana cara pengukuran dan penyajian modal intelektual. Di Indonesia terdapat regulasi yaitu PSAK no. 19 (revisi 2009) yang mengatur tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK no. 19 (revisi 2009) aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Akan tetapi, dalam regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu di ungkapkan. Dengan demikian, pengungkapan informasi modal intelektual merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela.

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual. Praktik dan pengungkapan informasi modal intelektual

merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan menjalin kerja sama yang aktif sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, perusahaan memperoleh manfaat yaitu dapat menjaga dan memelihara kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Corporate Governance meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Struktur dan mekanisme dalam *Corporate Governance* dapat digunakan untuk memonitoring tindakan manajemen perusahaan yang curang. Perusahaan yang menerapkan asas *good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnisnya akan lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang tidak hanya sekedar mematuhi peraturan atau Undang-Undang yang ada, tetapi juga informasi yang material dan relevan untuk kepentingan *stakeholder*. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh *stakeholder* yaitu informasi mengenai modal intelektual. *Stakeholder* membutuhkan informasi bagaimana penguasaan pengetahuan atau teknologi yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Penelitian ini lebih menekankan struktur *Corporate Governance* sebagai variabel independen karena terdapat beberapa pertimbangan. Variabel dewan komisaris dan dewan direksi digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kondisi di Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem Dua Tingkat atau *Two Board System* yaitu sistem yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dengan fungsi pengawasan (komisaris). Pada variabel komite audit digunakan dalam penelitian ini karena di Indonesia terdapat peraturan Bapepam

Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Dengan demikian, komite audit menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap pengungkapan modal intelektual.

Komite audit memegang peranan penting dalam mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuju terciptanya suatu kinerja yang diharapkan perusahaan. Komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memerlukan interaksi dengan audit internal (Moh Wahyudin, 2008).

Ketiga elemen tersebut merupakan sebagian dari beberapa struktur *Corporate Governance*. Jika ketiga elemen tersebut buruk maka akan berdampak terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia. Pengungkapan modal intelektual menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern. Laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya aset tidak berwujud berupa modal intelektual dan besarnya nilai yang diakui. Para akuntan dituntut mencari informasi lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual mulai dari pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2013:37).

Namun keberadaan pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan belum dapat terpecahkan dengan jelas. Pengukuran yang tepat terhadap modal intelektual perusahaan belum dapat ditetapkan. Sehingga banyak perusahaan perbankan yang tidak menerapkan pengungkapan modal intelektual di perusahaannya.

Fakta lainnya yaitu perusahaan perbankan di Indonesia masih rendah dan kurang menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Penelitian Purnomosidhi (2006:15) menemukan bahwa rata-rata jumlah atribut modal intelektual yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia sebesar 56%. Sementara hasil penelitian Suhardjanto dan Wardhani (2010:79) menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengungkapan modal intelektual perusahaan di Indonesia hanya sebesar 34,5%.

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti memasukkan penelitian terdahulu terkait pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual. Dalam penelitian tersebut pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia ternyata sudah cukup baik (rerata sebanyak 71% dari total 26 item *intellectual capital disclosure*). Tingginya tingkat *intellectual capital disclosure* menunjukkan penerapan prinsip *Corporate Governance* telah dilakukan dengan baik oleh perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin besarnya kesadaran perusahaan perbankan di Indonesia akan pentingnya *intellectual capital disclosure* dalam menciptakan dan mempertahankan keuntungan kompetitif dan *shareholder value*.

Selain itu penelitian terkait pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual terbatas pada kriteria tertentu saja sebagai proksi dari *Corporate Governance*, misalnya susunan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit (Dista Amalia, 2012). Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan satu kriteria saja sebagai pengukuran *Corporate Governance* belum mencerminkan pengaruh *Corporate Governance* secara keseluruhan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana struktur *Corporate Governance* dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya standar yang menetapkan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan.
2. Banyak perusahaan perbankan yang belum menerapkan pengungkapan modal intelektual secara menyeluruh di perusahaannya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Dari berbagai struktur *Corporate Governance* yang akan digunakan, penelitian ini hanya dibatasi pada proporsi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?
4. Apakah Struktur *Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit) berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Struktur *Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit) berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan serta pengalaman peneliti mengenai pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

b) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat dasar perencanaan dan kebijakan yang tepat khususnya

mengenai penerapan struktur *Corporate Governance* yang mungkin berguna dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terutama dalam bidang akuntansi, dan mendorong penelitian yang lebih lanjut melalui penambahan atau revisi variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Modal Intelektual

a. Pengertian Modal Intelektual

Kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan modal intelektual menjadi solusi tepat dalam persaingan global. Dengan modal intelektual, perusahaan dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya saing global, kinerja, dan nilai perusahaan.

Meskipun penting, modal intelektual merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Hal tersebut terbukti dalam berbagai definisi yang berbeda dari berbagai literatur yang ada. Menurut Sujan dan Abeysekara (dalam Branco, *et al.* 2010) bahwa modal intelektual merupakan bagian dari aset tidak berwujud. Woodcock dan Rosalind, (2009) menjelaskan bahwa modal intelektual adalah perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan. Sedangkan, menurut Branco, *et al.* (2010) modal intelektual sebagai sumber daya berbasis pengetahuan yang membantu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian, modal intelektual dapat didefinisikan yaitu semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

b. Komponen Modal Intelektual

Modal intelektual terdiri dari beberapa komponen yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menerapkan strateginya. Dengan memahami komponen-komponen modal intelektual, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing (Wahyu, 2009). Guthrie, *et al.* (dalam Woodcock dan Rosalind, 2009) menyatakan bahwa komponen modal intelektual terdiri dari tiga elemen utama, yaitu modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. Komponen modal intelektual akan dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

1) Modal Internal (*internal capital*)

Modal Internal merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan rutinitas kinerja yang didukung dengan operasi dan struktur yang berkaitan juga dengan usaha karyawan untuk menciptakan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Modal internal mengacu pada kekayaan intelektual dan infrastruktur perusahaan. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur perusahaan mencakup nilai, sistem, proses, filosofi manajemen, kultur perusahaan dan sebagainya. Kinerja perusahaan yang optimal tidak akan tercipta apabila sumber daya manusia intelektualnya tidak didukung oleh modal internal perusahaan yang baik, misalnya sistem operasi dan prosedur perusahaan yang buruk.

2) Modal Eksternal (*eksternal capital*)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai nyata bagi perusahaan. Modal eksternal menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Hubungan tersebut dapat juga dinyatakan dengan *relational capital*. Modal eksternal meliputi merek, pelanggan, kepuasan pelanggan, nama atau reputasi perusahaan, saluran distribusi, kerjasama bisnis, dan sebagainya.

3) Modal Manusia (*human capital*)

Modal manusia merupakan kemampuan perusahaan secara kolektif untuk menghasilkan solusi yang terbaik berdasarkan penguasaan pengetahuan dan teknologi dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Melalui daya pikir serta kontribusi sumber daya manusia yang intelektual inilah tercipta sumber inovasi dan kemajuan suatu perusahaan. Akan tetapi, modal manusia merupakan komponen modal intelektual yang sulit diukur. Modal manusia meliputi karyawan, pendidikan, pelatihan, kompetensi, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya.

c. Pengungkapan Modal Intelektual

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual yaitu mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga biaya modal perusahaan dapat mengalami penurunan. Pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan. Peningkatan nilai relevansi laporan keuangan dapat mencegah perusahaan pada kondisi sebagai berikut:

- 1) Kegagalan dalam menyampaikan informasi secara relevan sehingga mengakibatkan kemerosotan posisi keuangan perusahaan dan dapat menghilangkan daya saing jangka panjang.
- 2) Investor sulit menilai secara akurat nilai perusahaan untuk alokasi sumber daya dengan menggunakan laporan keuangan yang tidak melaporkan modal intelektual.
- 3) Manajer sulit untuk menentukan relevansi aset tidak berwujud yang diperlukan untuk operasi perusahaan.

Pengungkapan modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan dan *stakeholder*, serta mencegah kerugian dan rumor gosip yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Kepercayaan penting dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam menciptakan komitmen *stakeholder* yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen, *et al.*, 2009). Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual dapat juga dijadikan perusahaan sebagai alat pemasaran. Dengan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai-nilai sejati mereka yang diterapkan dalam perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi.

Pengelolaan modal intelektual perlu diberi perhatian secara lebih. Pengelolaan modal intelektual yang baik akan dapat membantu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan modal intelektual. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal penyajian dan penilaian aset tak berwujud terutama modal intelektual.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bruggen, *et al.* (2009) yang menjelaskan standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual. Menurut Brenan dan Connel (2010) konservatisme akuntansi untuk aset tidak berwujud memberikan sedikit kesempatan pada regulator dalam mengembangkan standar untuk modal intelektual.

Di Indonesia, pengungkapan modal intelektual masih bersifat *voluntary*. Sampai saat ini belum ada pengelompokan komponen modal intelektual yang dapat diterima bersama dan belum ada pola khusus pengungkapan modal intelektual (Yunanto, 2010). Namun demikian, terdapat perkembangan konsep modal intelektual di Indonesia dengan adanya regulasi yaitu PSAK No.19 (revisi 2009) tentang aset tak berwujud. Menurut PSAK No. 19 aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, dimiliki dan dibawah kontrol suatu perusahaan, dapat dijual, disewakan, dan dipertukarkan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.

Pengungkapan modal intelektual tidak disajikan dalam neraca. Hal tersebut disebabkan pengungkapan modal intelektual sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. Menurut Bruggen, *et al.* (2009) kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengakuan dan pengungkapan penuh pada komponen modal intelektual. Oleh karena itu, metode pengukuran baru dan model pelaporan modal intelektual seperti *IC Index* dapat membantu mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengukuran modal intelektual.

Pengungkapan modal intelektual dituangkan dalam informasi tambahan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan. Dengan melakukan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan seperti asimetri informasi. Jensen dan Meckling (2009) menyatakan bahwa biaya agen timbul dari perilaku oportunistik manajernya, sehingga mereka termotivasi untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yaitu informasi modal intelektual untuk mengurangi biaya agensi tersebut.

2. *Corporate Governance*

a. Definisi *Corporate Governance*

Corporate Governance dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan “pengendalian perusahaan” atau “tata kelola perusahaan”. Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Ismail Solihin (2009, hal 115) *Corporate Governance* merupakan suatu system untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *Corporate Governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban diantara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Sutedi (2011:7), definisi *Corporate Governance* seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2012, hal 54) *Corporate Governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (2009) *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Tata kelola yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip tersebut dalam proses manajerial. Melalui penerapan prinsip-prinsip universal diharapkan dapat menjamin keberlanjutan dan capaian kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*.

Maka dapat disimpulkan *Corporate Governance* adalah mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi untuk kepentingan jangka panjang baik bagi para pemegang saham maupun bagi pemangku kepentingan jalannya perusahaan.

b. Konsep *Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011:41), Konsep *Corporate Governance* pada intinya adalah pertama *internal balance* antar organ perusahaan RUPS, komisaris dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme

operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua, *external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

1) Unsur-unsur *Corporate Governance*.

Jika diperhatikan terdapat unsur-unsur *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsi *Corporate Governance*.

a) *Corporate Governance*-Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, kita namakan *Corporate Governance-internal* perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi: keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*), transparansi, *accountability*, *fairness* dan aturan dari *code of conduct*.

b) *Corporate Governance*-External Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance-external* perusahaan. Unsur yang berasal dari luar

perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: aturan dari *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, dan jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2) Model *Corporate Governance*

a) *Principal-Agent Model*

Principal Agent Model atau dikenal dengan *Agent Model*, dimana korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak, dan manajer sebagai agent di lain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi *Corporate Governance* suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar.

b) *The Myopic Market Model*

Masih memfokuskan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan manajer, di mana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *Corporate Governance*. Oleh karena itu, principal dan agent lebih berorientasi pada keuntungan-keuntungan jangka pendek.

c) Stakeholder Model

Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham.

3) Cakupan atau lingkup *Corporate Governance*

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak dan tanggung jawab pemegang saham;
- b) Hak dan tanggung jawab *stakeholder*;
- c) Perlakuan yang wajar terhadap pemegang saham;
- d) Keterbukaan dan transparansi; dan
- e) Wewenang dan tanggungjawab *Board of Directors*.

c. Struktur *Corporate Governance*

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur atau direksi. Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijabarkan mengenai fungsi wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat (5) perusahaan perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota dewan komisaris. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Indonesia menganut sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*) dalam menentukan fungsi dewan komisaris. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh dewan direksi agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan pemangku kepentingan.

2) Dewan direksi

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan direksi berperan dalam

menentukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan. Menurut Irmala Sari (2010:31) dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana.

3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut peraturan BAPEPAM Kep29/PM/2004 tentang peraturan nomor IX.1.5 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.

Menurut KNKG (2006) jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan pengambilan keputusan. Ukuran komite audit harus ditentukan oleh perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri agar terpelihara integritas dan pandangan obyektif dalam penyusunan rekomendasi.

Dengan demikian, individu yang mandiri akan lebih adil dalam menangani suatu masalah.

Struktur komite audit telah diatur oleh peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 tentang peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit sebagai berikut:

- a) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2010) dijelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c) Pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- d) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- e) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Kewenangan komite audit sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas apapun dan hanya bertindak sebagai rekomendasi dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang memperoleh hak kuasa eksplisit

dari dewan komisaris. Hak kuasa tersebut yaitu menentukan dan mengevaluasi komposisi auditor eksternal, memimpin suatu investigasi, dan sebagainya.

d. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik, diantaranya adalah:

1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good Corporate Governance* (GCG) perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Governance*

Menurut Pratiwi (2012:34), terdaftar dua faktor dalam *Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Corporate Governance*.

- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Corporate Governance*.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2) Faktor Eksternal

Maksud faktor eksternal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Corporate Governance* yang berasal dari luar perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a) Pelaku dan lingkungan bisnis meliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti *business community* atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, *supplier* dan pelanggan yang menuntut perusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda.

b) Pemerintah dan regulator

Pemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi

semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor.

c) Investor

Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etika bisnis.

d) Komunitas Keuangan

Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu itu antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Made Ari Wahyuni dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> da pengungkapan modal	X1=komisaris independen X2=konsentrasi kepemilikan X3=komite audit	Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut: a. komisaris independe berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

		intelektual (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)	Y=pengungkapan modal intelektual	b. konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual. c. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual
2.	Dista Amalia Arifah (2012)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap <i>intellectual capital</i> pada perusahaan <i>IC Insentive</i>	X1=ukuran dewan komisaris X2=keindependensian dewan komisaris X3=kesibukan komisaris independen X4=komite audit Y= <i>Intellectual Capital</i>	Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut: Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kesibukan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hanya komite audit yang berpengaruh terhadap pengungkapan IC.
3.	Yulanda Nurfauzi dan Arif Lukman Santoso (2012)	Struktur <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> studi empiris Pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI	X1=proporsi komisaris independen X2=ukuran komite audit X3=jumlah rapat komite audit Y= <i>Intellectual Capital disclosure</i>	Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>Intellectual Capital disclosure</i> b. ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap <i>Intellectual Capital disclosure</i> c. jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap <i>Intellectual Capital disclosure</i>
4.	Chandra (2010)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan	X1=struktur kepemilikan X2= proporsi dewan komisaris independen	Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Struktur kepemilikan berhubungan dengan pengungkapan

		<i>intellectual capital</i>	X3= jumlah komite audit X4= frekuensi pertemuan komite audit Y=pengungkapan <i>intellectual capital</i>	<i>intellectual capital</i> . b. Proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .
5.	Artinawati (2009)	Pengaruh faktor ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, <i>leverage</i> , kepemilikan saham, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual	X1=faktor ukuran perusahaan X2=umur perusahaan X3=komisaris independen X4= <i>leverage</i> X5= kepemilikan saham X6=profitabilitas Y=pengungkapan modal intelektual	Adapun hasil dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , kepemilikan saham, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. b. Umur perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual

C. Kerangka Konseptual

Dewan komisaris merupakan anggota dewan direksi yang bersifat independen dan tidak memihak ke pihak manapun sehingga tidak dapat terpengaruh oleh pihak manapun. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara efektif dalam pengungkapan modal intelektual akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

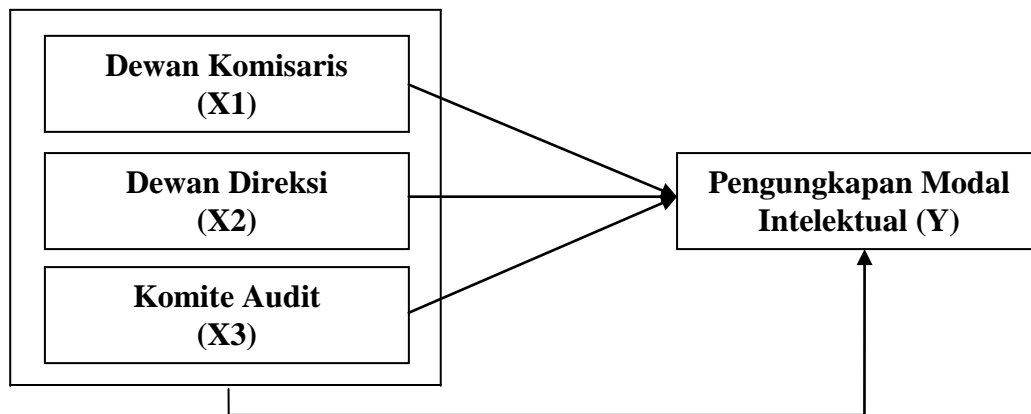
Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan berjalannya sistem dalam perusahaan. Peran yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikannya organ yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan dalam pengungkapan modal intelektual.

Komite audit merupakan pihak yang independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan juga pelaporan keuangannya. Dengan adanya komite audit, diharapkan mampu menciptakan pengungkapan modal intelektual dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit digunakan sebagai variabel independen untuk menjelaskan bagaimana struktur *Corporate Governance* mempengaruhi pengungkapan modal intelektual sebagai variabel dependen. Penelitian yang menguji struktur *Corporate Governance* mempengaruhi pengungkapan modal intelektual sudah banyak dilakukan. Namun, beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa struktur *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Meskipun penelitian-penelitian tentang struktur *Corporate Governance* dengan pengungkapan modal intelektual menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa struktur *Corporate Governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata yaitu *hipo* (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian. Adapun hipotesis dari permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

- H1: Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
- H2: Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

- H3: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
- H4: Struktur *Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit) berpengaruh terhadap pengungkapan modal Intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang terdapat pada penelitian ini berbentuk angka sehingga termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dewan komisaris (X1)

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dengan pihak principal dengan melakukan pengungkapan informasi mengenai informasi modal intelektual. Ukuran

dewan komisaris dapat diukur dengan cara menghitung jumlah dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan.

b. Dewan direksi (X2)

Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam menentukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan cara menghitung jumlah dewan direksi dalam laporan tahunan perusahaan.

c. Komite audit (X3)

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan operasi perusahaan. Ukuran komite audit dapat diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan yang dinyatakan dengan ICD *Index* (*Intellectual Capital Disclosure Index*). Metode *content analysis* digunakan untuk mengukur jumlah pengungkapan modal intelektual dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung di dalam kerangka modal intelektual yang dipilih.

Apabila item yang ditentukan diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila item yang ditentukan tidak diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 0.

Indeks pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang telah dikembangkan oleh Bukh *et al.*

(2005). Pengungkapan di ukur melalui enam dimensi yang meliputi karyawan, konsumen, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan, serta pernyataan strategi yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Item Pengungkapan Modal Intelektual

Keterangan	Item	Kode
<i>Employee</i> Karyawan (27 item)	Rincian karyawan berdasarkan umur	E1
	Rincian karyawan berdasarkan senioritas	E2
	Rincian karyawan berdasarkan gender	E3
	Rincian karyawan berdasarkan kebangsaan	E4
	Rincian karyawan berdasarkan departemen	E5
	Rincian karyawan berdasarkan fungsi pekerjaan	E6
	Rincian karyawan berdasarkan pendidikan	E7
	Tingkat perputaran karyawan	E8
	Komentar mengenai perubahan jadwal karyawan	E9
	Komentar mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan	E10
	Tingkat ketidakhadiran karyawan	E11
	Diskusi wawancara karyawan	E12
	Pernyataan kebijakan tentang pengembangan kompetensi	E13
	Deskripsi program dan aktivitas pengembangan kompetensi	E14
	Biaya pendidikan dan pelatihan	E15
	Biaya pendidikan dan pelatihan berdasarkan jumlah karyawan	E16
	Biaya karyawan berdasarkan jumlah karyawan	E17
	Kebijakan rekrutmen perusahaan	E18
	Indikasi terpisah perusahaan yang memiliki departemen HRM, divisi atau fungsi	E19
	Rotasi kesempatan pekerjaan	E20
	Kesempatan karir	E21
	System remunerasi dan insentif	E22
	Pension	E23
	Polis asuransi	E24
	Laporan kebergantungan pada personil kunci	E25
	Pendapatan karyawan	E26
	Nilai tambah per karyawan	E27
<i>Costumer</i> Pelanggan (14 item)	Jumlah pelanggan	C1
	Rincian penjualan berdasarkan pelanggan	C2
	Penjualan tahunan per segmen atau produk	C3
	Ukuran rata-rata pembelian oleh pelanggan	C4

	Ketergantungan pada pelanggan utama Deskripsi keterlibatan pelanggan dalam operasi perusahaan Deskripsi hubungan pelanggan Pendidikan atau pelatihan pelanggan Rasio pelanggan untuk karyawan Nilai tambah per pelanggan atau segmen Pangsa pasar absolute perusahaan dalam industri (persen) Pangsa pasar relative perusahaan (tidak dinyatakan dalam persen) Pangsa pasar berdasarkan negara, segmen, produk (persen) <i>Repurchases</i>	C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
IT Teknologi Informasi (5 item)	Deskripsi investasi TI Deskripsi system TI yang ada Asset <i>software</i> yang dimiliki atau dikembangkan perusahaan Deskripsi fasilitas TI Biaya TI	IT 1 IT 2 IT 3 IT 4 IT 5
<i>Processes</i> Proses (8 item)	Informasi dan komunikasi dalam perusahaan Upaya terkait dengan lingkungan kerja Bekerja dari rumah Berbagi pengetahuan dan informasi internal Berbagi pengetahuan dan informasi eksternal Mengukur kegagalan proses internal atau eksternal Diskusi balas jasa dan program sosial perusahaan Persetujuan lingkungan dan pernyataan atau kebijakan	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
<i>Research and development</i> Penelitian dan pengembangan (9 item)	Pernyataan kebijakan, strategi dan tujuan aktivitas R&D Biaya R&D Rasio biaya R&D untuk penjualan R&D yang diinvestasikan dalam penelitian dasar R&D yang diinvestasikan dalam desain dan pengembangan produk Rincian prospek masa depan tentang R&D Rincian paten perusahaan yang ada Jumlah paten, lisensi, dan sebagainya Informasi tentang paten yang tertunda	RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 RD9
<i>Strategic statements</i> Pernyataan strategi (15 item)	Deskripsi teknologi produksi baru Pernyataan tentang kinerja kualitas perusahaan Informasi tentang aliansi strategis perusahaan Tujuan dan alasan aliansi strategis Komentar dampak aliansi strategis Deskripsi jaringan pemasok dan distributor Pernyataan citra dan merek Pernyataan budaya perusahaan Pernyataan tantang praktik terbaik Struktur organisasi perusahaan	SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10

	Pemanfaatan energy, bahan baku dan bahan input lainnya	SS11
	Investasi di lingkungan	SS12
	Deskripsi keterlibatan karyawan	SS13
	Informasi tentang tanggung jawab social perusahaan dan tujuannya	SS14
	Deskripsi kontrak karyawan atau masalah karyawan	SS15

Penilaian *ICD Index* ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perhitungan *ICD Index* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ICD\ Index = \sum \frac{di}{M} \times 100\%$$

Keterangan:

ICD Index = Indeks pengungkapan modal intelektual

Di = Jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan perusahaan.

M = Jumlah maksimum item pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan perusahaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 melalui www.idx.co.id.

2. Waktu penelitian

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2011:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang berjumlah 43 perusahaan.

2) Sampel Penelitian

Menurut Sugiono (2011) dalam Febry (2013) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar,

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling, yaitu menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Arif Rahman Hakim, 2011).

Berikut ini kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan tahunan (annual report) untuk periode 31 desember 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dinyatakan dalam rupiah.
2. Perusahaan perbankan yang mempunyai data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan yaitu tahun 2015-2017.
3. Perusahaan perbankan yang mengungkapkan data mengenai modal intelektual minimal setengah dari total item pengungkapan modal intelektual yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan yaitu tahun 2015-2017.

Melalui metode tersebut, maka sampel final yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan perbankan sesuai dengan kriteria di atas yaitu sebagai berikut:

Tabel III.3
Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode Efek	Nama Emitmen
1.	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3.	BNGA	Bank CIMB Niaga TbkBank Victoria Internasional Tbk
4.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
5.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
7.	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
8.	BNLI	Bank Permata Tbk
9.	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
10.	INPC	Bank Artha Graha International Tbk
11.	NISP	Bank OCBC NISP Tbk

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yaitu mengenai variabel yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, website, jurnal, artikel, tulisan ilmiah dan catatan di media masa. Data-data tersebut diperoleh melalui situs resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu www.idx.co.id. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang telah diaudit periode 2015-2017 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa analisis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Analisis ini umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang digunakan dalam penelitian (Ikhsan, Arfan dkk, 2014:150)

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, tentunya model tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Oleh karena itu, dalam analisis regresi linier berganda ini, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Menurut Azuar dkk (2013:157) dalam analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan bukan mendahului analisis (apriori), tetapi dilakukan setelah analisis regresi berganda (aposteoriti). Apabila hasil pengujian hipotesis menghasilkan penolakan H_0 (ada hubungan yang signifikan) maka tidak perlu dilakukan

pengujian asumsi. Tetapi jika hasil hipotesis menghasilkan penerimaan H_0 (tidak ada hubungan yang signifikan) maka barulah diperlukan pengujian asumsi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Azuar dkk, 2013:169). Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan normal probability plot dengan melihat butiran data menyebar searah garis diagonal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (Azuar dkk, 2013:170). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Azuar dkk, 2013:171). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada absolut residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya) (Azuar dkk, 2013:173). Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin - Watson, yaitu dengan menghitung nilai d statistik. Nilai d statistik ini dibandingkan dengan nilai d tabel dengan tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, digunakan metode Durbin-Watson (Dw Test).

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini menggunakan alat bantu *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Secara sistematis persamaan dalam regresi linear berganda ini dapat dilihat model matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pengungkapan modal intelektual

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X1 : Dewan Komisaris perusahaan

X2 : Dewan Direksi perusahaan

X3 : Komite Audit perusahaan

ε : Error

4. Pengujian hipotesis

a. Uji t

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen digunakan uji t. Dalam penelitian ini menguji apakah struktur *Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Rumus hipotesisnya adalah:

$H_{01}: B_1 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_{a1}: B_1 > 0$: Terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_{02}: B_2 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_{a2}: B_2 > 0$: Terdapat pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_{03}: B_3 \leq 0$: Tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_{a3}: B_3 > 0$: Terdapat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengujian hipotesis ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% atau dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%) maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0) yang artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka keputusannya menolak hipotesis nol (H_0) yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual.

Rumus hipotesisnya adalah :

$H_0: B_1, B_2, B_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Struktur *Corporate Governance* (Dewan komisaris, dewan direksi dan Komite Audit) secara simultan terhadap pengungkapan modal intelektual.

$H_0: B_1, B_2, B_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh Struktur *Corporate Governance* (Dewan komisaris, dewan direksi dan Komite Audit) secara simultan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pengujian Hipotesis ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% atau dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%) maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0) yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%)

maka keputusannya menolak hipotesis nol (H_0) yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas (Azuar dkk,2013:174). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai Adjusted R^2 lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif untuk memaparkan variabel penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diolah menggunakan SPSS v.24.00. Variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengungkapan Modal Intelektual (Y1)

Pengungkapan modal intelektual merupakan sebuah laporan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan secara luas bagi pengguna laporan yang tidak ikut serta dalam proses penyusunan laporan tersebut sehingga para pengguna dapat memperoleh informasi yang mereka inginkan. Dimana laporan tersebut memuat semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan modal intelektual, perusahaan dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya saing global, kinerja dan nilai perusahaan. Pengungkapan modal intelektual diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan

tahunan. Pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini diukur dengan penilaian *ICD Index* yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan perusahaan. Pengungkapan modal intelektual pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Indeks Pengungkapan Modal Intelektual Perusahaan Tahun 2015-2017

Kode Emiten	ICD Index			Jumlah	Rata-rata
	2015	2016	2017		
BBCA	0,6154	0,6410	0,6538	1,9102	0,6367
BBMD	0,5000	0,5256	0,5641	1,5897	0,5299
BBNI	0,5128	0,5385	0,5769	1,6282	0,5427
BBRI	0,5512	0,6153	0,6923	1,8588	0,6196
BDMN	0,5897	0,6410	0,6923	1,9230	0,6410
BMRI	0,6538	0,6795	0,7564	2,0897	0,6966
BNGA	0,5128	0,5384	0,6025	1,6537	0,5512
SBNLI	0,5256	0,5256	0,5384	1,5896	0,5299
BVIC	0,5385	0,5128	0,6538	1,7024	0,5675
INPC	0,5385	0,5513	0,5897	1,6795	0,5598
NISP	0,5897	0,5513	0,5769	1,7179	0,5726
Jumlah	6,1280	6,3203	6,8971	19,3427	6,4475
Rata-rata	0,5571	0,5746	0,6270	1,7584	0,5861

Sumber : www.idx.co.id (Data yang diolah) 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2015 diketahui rata-rata indeks pengungkapan modal intelektual sebesar 0,5571 (55,71%) sedangkan tahun 2016 sebesar 0,5746 (57,46%) atau mengalami kenaikan sebesar 1,75%. Dan pada tahun 2017 rata-rata indeks pengungkapan modal intelektual sebesar 0,6270 (62,70%) atau mengalami kenaikan kembali sebesar 5,24%. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata indeks pengungkapan

modal intelektual dari tahun 2015-2017 sebesar 0,5861 (58,61%). Nilai minimum dari indeks pengungkapan modal intelektual sebesar 0,5 yang dimiliki oleh PT.Bank Mestika Dharma Tbk pada tahun 2015, sedangkan nilai maksimalnya sebesar 0,7564 yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) pada tahun 2017.

b. Dewan Komisaris (X1)

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Jumlah dewan komisaris pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2
Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2017

Kode Emitmen	Dewan Komisaris			Jumlah	Rata-rata
	2015	2016	2017		
BBCA	5	5	5	15	5
BBMD	3	4	4	11	3,67
BBNI	9	8	8	25	8,33
BBRI	8	8	12	28	9,33
BDMN	7	6	6	19	6,33
BMRI	8	8	8	24	8
BNGA	8	8	9	25	8,33
BNLI	8	8	8	24	8
BVIC	5	4	4	13	4,33
INPC	6	7	6	19	6,33
NISP	8	8	8	24	8
Jumlah	75	74	78	227	75,65
Rata-rata	6,82	6,73	7,09	20,64	6,88

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah) 2019

Pada tabel IV.2 dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat diketahui nilai minimum dari dewan komisaris sebesar 3, dimana perusahaan yang memiliki dewan komisaris sebanyak 3 orang yaitu PT. Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD) pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 12, dimana perusahaan yang mempunyai 12 orang dewan komisaris yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Rata-rata Dewan Komisaris selama 3 tahun sebesar 6,88. Nilai rata-rata secara keseluruhan menunjukkan bahwa dewan komisaris telah memenuhi standar jumlah anggota dewan komisaris, bahwa jumlah anggota dewan komisaris umumnya memiliki minimal 1 orang anggota dewan komisaris.

c. Dewan Direksi (X2)

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan direksi berperan dalam menentukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan direksi pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3
Dewan Direksi Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2017

Kode Emitmen	Dewan Direksi			Jumlah	Rata-rata
	2015	2016	2017		
BBCA	10	11	6	27	9
BBMD	5	5	5	15	5
BBNI	9	10	10	29	9,67
BBRI	11	11	11	33	11
BDMN	7	9	7	23	7,67
BMRI	11	10	7	28	9,33
BNGA	9	10	11	30	10
BNLI	10	10	9	29	9,67
BVIC	5	5	5	15	5
INPC	7	6	8	21	7

NISP	10	10	10	30	10
Jumlah	75	74	78	227	93,33
Rata-rata	8,54	8,82	8,09	25,45	8,48

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah) 2019.

Pada tabel IV.3 dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat diketahui nilai minimum dari dewan direksi sebesar 5, dimana perusahaan yang memiliki dewan direksi sebanyak 5 orang yaitu PT. Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD) dan PT. Bank Victoria International Tbk (BVIC). Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 11, dimana perusahaan yang mempunyai 11 orang dewan direksi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) pada tahun 2017. Rata-rata dewan direksi selama 3 tahun sebesar 8,48. Nilai rata-rata secara keseluruhan menunjukkan bahwa dewan direksi telah memenuhi standar jumlah anggota dewan direksi, bahwa jumlah anggota dewan direksi umumnya memiliki minimal 1 orang anggota dewan direksi.

d. Komite Audit (X3)

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Dewan Komite Audit Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2017

Kode Emitmen	Komite Audit			Jumlah	Rata-rata
	2015	2016	2017		
BBCA	3	3	3	9	3
BBMD	3	3	3	9	3
BBNI	5	3	2	10	3,33
BBRI	6	6	6	18	6
BDMN	5	5	3	13	4,33
BMRI	5	6	6	17	5,67
BNGA	6	4	4	14	4,67
BNLI	3	4	2	9	3
BVIC	4	4	4	12	4
INPC	6	6	5	17	5,67
NISP	4	3	3	10	3,33
Jumlah	50	47	41	138	46
Rata-rata	4,54	4,27	3,73	12,55	4,18

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah) 2019

Pada tabel IV-4 dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat diketahui nilai minimum dari komite audit sebesar 2, dimana perusahaan yang memiliki komite audit sebanyak 2 orang yaitu PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT. Bank Permata Tbk (BNLI). Sedangkan nilai maksimalnya sebesar 6, dimana perusahaan yang mempunyai 6 orang komite audit yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT. Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), dan PT. Bank Artha Graha International Tbk (INPC). Rata-rata komite audit selama 3 tahun sebesar 4,18. Nilai rata-rata secara keseluruhan menunjukkan bahwa komite audit telah memenuhi standar jumlah anggota komite audit, bahwa jumlah anggota komite audit umumnya memiliki minimal 3 orang anggota komite audit.

e. Statistik Deskriptif

Deskriptif data variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan modal intelektual (ICD) dan Struktur *Corporate Governance* (Dewan komisaris, Dewan direksi, Komite audit) pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda.

Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel IV.5
Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	33	3.00	12.00	227.00	6.8788	1.93258
Dewan Direksi	33	5.00	11.00	280.00	8.4848	2.20966
Komite Audit	33	2.00	6.00	138.00	4.1818	1.30993
ICD Index	33	.50	.76	19.35	.5862	.06428
Valid N (listwise)	33					

Sumber: Data Diolah (2019).

Dari tabel statistik deskriptif seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Besarnya dewan komisaris pada 11 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 6,879, nilai minimum sebesar 3,00, nilai maximum sebesar 12,00, dan

standar deviasi sebesar 1,932. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel dewan komisaris baik.

2. Dewan Direksi

Besarnya dewan direksi pada 11 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 8,485, nilai minimum sebesar 5,00, nilai maximum sebesar 11,00, dan standar deviasi sebesar 2,210. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel dewan direksi baik.

3. Komite Audit

Besarnya komite audit pada 11 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 4,182, nilai minimum sebesar 2,00, nilai maximum sebesar 6,00, dan standar deviasi sebesar 1,310. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran dari variabel komite audit baik.

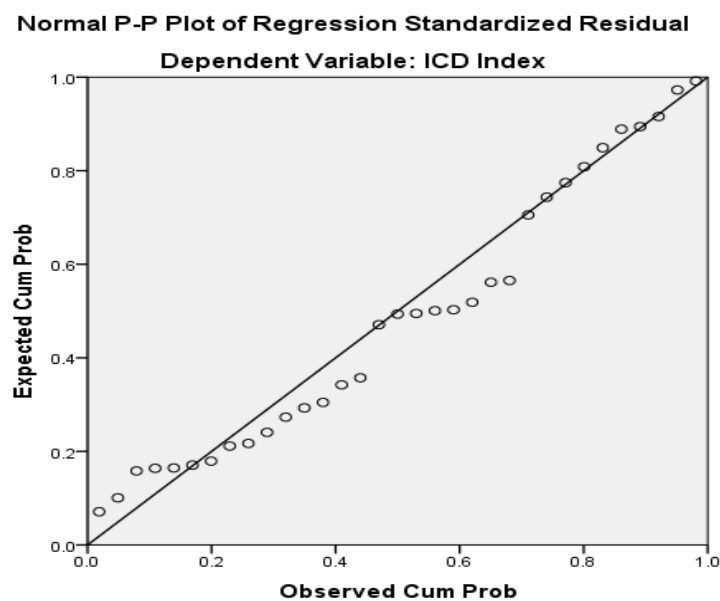
4. Pengungkapan Modal Intelektual (ICD)

Besarnya Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) pada 11 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 0,5862, nilai minimum sebesar 0,50, nilai maximum sebesar 0,76 dan standar deviasi sebesar 0,0643. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran dari variabel Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) baik.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk melihat adanya normalitas residual adalah dengan melihat histogram, berikut ini uji normalitas akan disajikan dalam bentuk grafik normal plot.



Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24.00

Pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tampilan grafik normal P-Plot terlihat memenuhi asumsi uji normalitas, karena data meyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (Azuar dkk, 2013:

170). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai factor inflasi varian (variance inflasi factor/VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5. Hasil analisis data data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Komisaris	.368	2.718
Dewan Direksi	.416	2.405
Komite Audit	.820	1.220

a. Dependent Variable: ICD Index

Sumber: Hasil pengujian menggunakan SPSS 24.00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel bebas yang telah ditentukan (tidak melebihi 5), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Juliandi dan Irfan, 2013, hal 173). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*First Order Autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstan) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara

variabel independen. Kriteria pengujiannya adalah dengan melihat nilai Durbin – Watson (DW test) sebagai berikut:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan nilai DW sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.269 ^a	.072	-.023	.06503	1.182

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ICD Index

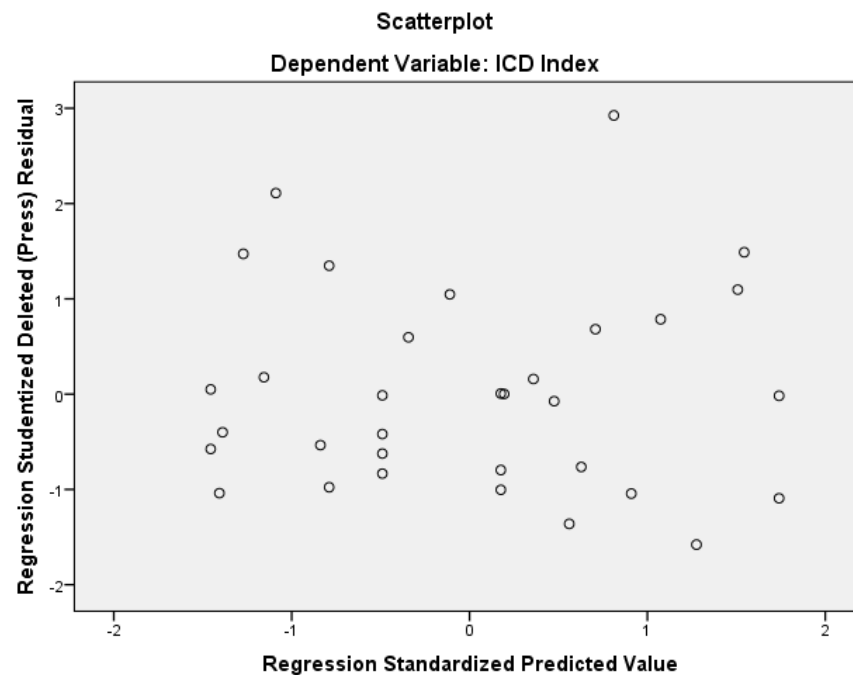
Sumber: Hasil pengujian menggunakan SPSS 24.00

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 1.182 yang berarti (Nilai DW antara -2 sampai +2) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi di atas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Azuar dkk, 2006:71). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistik. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan

uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada absolut residual, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.2 Grafik *Scatterplot*

Sumber: data diolah dengan SPSS 24.00

Pada pola gambar Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian atas angka 0 atau dibagian bawah angka 0 dari sumbu Y. Selain itu penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS regresi linear berganda menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda antara dewan komisaris, dewan direksi dan

komite audit terhadap Pengungkapan modal intelektual (ICD). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.510	.056		9.144	.000
Dewan Komisaris	-.001	.010	-.025	-.086	.932
Dewan Direksi	.004	.008	.138	.498	.622
Komite Audit	.012	.010	.235	1.189	.244

a. Dependent Variable: ICD Index

Sumber: Hasil pengujian menggunakan SPSS 24.00

Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 0,510 + (-0,001) + 0,008 + 0,3963 + \varepsilon$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,510 menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas (dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komite audit (X3)) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Pengungkapan modal intelektual (Y) akan sebesar 0,510.

2. Koefisien dewan komisaris sebesar -0,001 menunjukkan bahwa setiap penambahan dewan komisaris sebesar satu-satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan pengungkapan modal intelektual sebesar -0,001.
3. Koefisien dewan direksi sebesar 0,008 menunjukkan bahwa setiap penambahan dewan direksi sebesar satu-satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan pengungkapan modal intelektual sebesar 0,008.
4. Koefisien komite audit sebesar 0,3963 menunjukkan bahwa setiap penambahan komite audit sebesar satu-satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan pengungkapan modal intelektual sebesar 0,3963.

4. Uji Hipotesis

a) Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Y). Uji t ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan dua arah dan $dk = n-2$, $dk = 33-2 = 31$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar -2,040.

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,086 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,932. Di dalam hal ini $t_{hitung} -0,086 > t_{tabel} -2,040$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,932 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis nol ($H0_1$) diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen pertama (X1) yaitu

dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

2. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan modal Intelektual.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,498 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,622. Di dalam hal ini $t_{hitung} 0,498 > t_{tabel} -2,040$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,622 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis nol ($H0_2$) diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen kedua (X2) yaitu dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,189 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,244. Di dalam hal ini $t_{hitung} 1,189 > t_{tabel} -2,040$ dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,244 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis nol ($H0_3$) diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen ketiga (X3) yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y). Kriteria uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan nilai F untuk F_{tabel} $dk = n - k - 1$, $dk = 33 - 3 - 1 = 29$ adalah sebesar 2,930.

Tabel IV.9

Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.010	3	.003	.755	.528 ^a
	Residual	.123	29	.004		
	Total	.132	32			

a. Dependent Variable: ICD Index

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Sumber: Hasil pengujian menggunakan SPSS 24.00

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas dapat diketahui nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ adalah ($0,755 < 2,930$) dan nilai signifikan $0,528 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis nol (H_0) diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV.10
Hasil Uji R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.269 ^a	.072	-.023	.06503

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ICD Index

Sumber: Hasil pengujian menggunakan SPSS 24.00

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit terhadap Pengungkapan modal intelektual. Dari hasil output regresi diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar -0,023. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 0,269 atau 26,9%. Artinya variabel bebas belum mampu menjelaskan variabel terikat. Dengan demikian masih ada variabel lain yang turut mempengaruhi besarnya pengungkapan modal intelektual perusahaan, yaitu sebesar 73,1%.

B. Pembahasan

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual.

Dewan komisaris adalah anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi

kepentingan perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris yang baik akan mendukung pengungkapan modal intelektual perusahaan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis pertama diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,086 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,932. Di dalam hal ini $t_{hitung} -0,086 > t_{tabel} -2,040$ dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,932. Karena nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi yang ditentukan ($0,932 > 0,05$) maka hipotesis nol ($H0_1$) diterima, yang artinya menolak hipotesis alternatif ($H\alpha_1$). Berarti bahwa secara parsial variabel independen pertama (X1) yaitu dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dista Amalia Arifah (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Bertambahnya pengawasan dimaksudkan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha yang sehat dan berkurangnya perilaku manajemen yang menyimpang. Akan tetapi, pengangkatan dewan komisaris yang cenderung hanya untuk formalitas untuk memenuhi peraturan yang ada dan kurang kesadaran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan menyebabkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menyebabkan tujuan dibentuknya dewan komisaris tidak berjalan dan tidak terjadi peningkatan pengungkapan modal

intelektual. Oleh sebab itu, keberadaan dewan komisaris tidak meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga tidak meningkatkan nilai perusahaan.

Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Yulanda Nur Fauzi dan Arif Lukman Santoso (2012) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Intellectual Capital Disclosure*. Peneliti berargumen bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam dewan, akan semakin memberikan pengaruh dalam pengungkapan modal intelektual. Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2. Pengaruh dewan direksi terhadap Pengungkapan modal intelektual

Dewan direksi berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan direksi memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, dengan adanya dewan direksi yang cakap dan profesional maka nantinya akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kecakapan dan kompetensinya menjadi dewan direksi akan membuat perusahaan memiliki banyak relasi diluar perusahaan, sehingga perusahaan semakin berkembang dalam hal pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis kedua diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,498 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,622. Di dalam hal ini t_{hitung} 0,498 > t_{tabel} -2,040 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,622. Karena nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi yang ditentukan ($0,622 > 0,05$) maka hipotesis nol ($H0_2$) diterima, yang artinya menolak hipotesis alternatif ($H\alpha_2$). Berarti bahwa secara parsial variabel independen kedua (X2) yaitu dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian A.A dan Mohd Ghazali (2013) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh positif signifikan besaran dewan direksi terhadap *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan cost and benefit theory dewan direksi hanya akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi ketika manfaat yang dihasilkan melebihi biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk pengungkapan itu sendiri. Termasuk dalam pengungkapan informasi *intellectual capital* dewan direksi hanya akan mengungkapkan informasi *intellectual capital* ketika manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang akan dikeluarkan.

3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual

Komite audit memiliki peran untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan perusahaan, khususnya dalam pengawasan pengendalian internal perusahaan. Komite audit juga berperan untuk

menjembatani antara auditor eksternal dan auditor internal. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan, maka akan memperkecil terjadinya tindakan yang tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen demi kepentingannya sendiri, dengan begitu kinerja perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis ketiga diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,189 dan nilai tingkat signifikansinya adalah 0,244. Di dalam hal ini $t_{hitung} 1,189 > t_{tabel} -2,040$ dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,244. Karena nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi yang ditentukan ($0,244 > 0,05$) maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang artinya menolak hipotesis alternatif (H_a). Berarti bahwa secara parsial variabel independen ketiga (X3) yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Chandra (2010) yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan dari besaran komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* karena keberadaan komite audit pada perusahaan di Indonesia hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan Bapepam No.Kep 29/PM/2004 dan menghindari sanksi administrasi. Hal ini dapat menyebabkan penerapan *corporate governance* yang diharapkan mampu mendorong pengungkapan modal intelektual tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Pengaruh *Good Corporate Governance* (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit) terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa signifikansi F hitung sebesar 0,755 dan F tabel sebesar 2,930 artinya $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ ($0,755 < 2,930$) sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0,528 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari hasil output regresi diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,269. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 0,269 atau 26,9%. Artinya variabel bebas belum mampu menjelaskan variabel terikat. Dengan demikian masih ada variabel lain yang turut mempengaruhi besarnya pengungkapan modal intelektual perusahaan, yaitu sebesar 73,1%.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan modal intelektual. Dengan adanya penerapan Struktur *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan yaitu dengan memilih dewan komisaris yang kompeten yang akan mengawasi kinerja dewan direksi dalam melakukan kebijakan dan strategi perusahaan, dewan direksi akan semakin baik dalam melakukan kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Begitu pula dengan adanya dewan direksi yang kompeten dalam melakukan perencanaan strategis perusahaan, akan meningkatkan pengungkapan modal intelektual perusahaan. Begitu pula dengan komite audit yang sangat berperan penting dalam membantu dewan komisaris untuk mengawasi pengendalian internal dalam

perusahaannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif, yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. SARAN

Dibawah ini peneliti akan memberikan saran yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi para Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BAPEPAM

Para Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BAPEPAM agar dapat menetapkan standar yang lebih baik mengenai pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Bagi manajemen perusahaan

Bagi manajemen perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, informasi empiris dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan bagi para manajer khususnya pada perusahaan berbasis pengetahuan untuk perlu mengetahui pentingnya modal intelektual sebagai alat untuk meningkatkan nilai perusahaan agar dapat berkompetisi di pasar global.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain tidak hanya variabel yang ada didalam penelitian ini seperti ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, konsentrasi kepemilikan saham, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan lainnya. Dan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat menggambarkan dengan lebih baik pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan dkk (2016). *Analisa Laporan Keuangan*, Medan: Madenatera.
- Azuar Juliandi, Irfan, Saprinal Manurung (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU Press.
- Ayu Erika Fitriani, dan Dr.H.Agus Purwanto MSi Akt (2012). *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (studi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bapepam Kep-29/PM/2004. Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Bapepam Kep-134/BL/2006. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emitmen atau Perusahaan Publik.
- Dista Amalia Arifah (2012). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap pengungkapan intellectual Capital pada perusahaan IC Intensive*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 9 Nomor 2. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Hamdani (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Kep 117/M-MBU/200 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Made Arie Wahyuni dan Ni Ketut Rasmini (2016). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada pengungkapan Modal Intelektual studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol 21. No.1. Universitas Udayana, Bali.
- Pedoman Penulisan Skripsi (2009). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Purnomosidhi, Bambang (2006). *Praktik Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Publik di BEJ*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, vol.9 hal.1

Sawarjuwono, Tjiptohadi dan Agustine Prihatin Kadir (2013). *Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, vol 5 hal 1.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bab VIII Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 108 ayat 5.

Yulanda Nurfauzi dan Arif Lukman Santoso (2013). *Struktur Corporate Governance dan Pengungkapan Intellectual Capital studi empiris pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

LAMPIRAN 1

Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode Efek	Nama Emitmen
1.	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3.	BNGA	Bank CIMB Niaga TbkBank Victoria Internasional Tbk
4.	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
5.	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
7.	BMRI	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
8.	BNLI	Bank Permata Tbk
9.	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
10.	INPC	Bank Artha Graha International Tbk
11.	NISP	Bank OCBC NISP Tbk

LAMPIRAN 2

Data Perhitungan Pengungkapan Modal Intelektual (ICD)

$$\text{ICD Index} = \frac{(\text{di}) \text{jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan}}{(\text{m}) \text{jumlah maksimum pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan}}$$

No.	Kode bank	Tahun	di	m	ICD Index
1	BBCA	2015	48	78	0,6154
		2016	50	78	0,6410
		2017	51	78	0,6538
2	BBMD	2015	39	78	0,5000
		2016	41	78	0,5256
		2017	44	78	0,5641
3	BBNI	2015	40	78	0,5128
		2016	42	78	0,5385
		2017	45	78	0,5769
4	BBRI	2015	43	78	0,5512
		2016	48	78	0,6153
		2017	54	78	0,6923
5	BDMN	2015	46	78	0,5897
		2016	50	78	0,6410
		2017	54	78	0,6923

6	BMRI	2015	51	78	0,6538
		2016	53	78	0,6795
		2017	59	78	0,7564
7.	BNGA	2015	40	78	0,5128
		2016	42	78	0,5384
		2017	47	78	0,6025
8.	BNLI	2015	40	78	0,5256
		2016	41	78	0,5256
		2017	42	78	0,5384
9.	BVIC	2015	42	78	0,5385
		2016	40	78	0,5128
		2017	51	78	0,6538
10.	INPC	2015	42	78	0,5385
		2016	43	78	0,5513
		2017	46	78	0,5897
11.	NISP	2015	46	78	0,5897
		2016	43	78	0,5513
		2017	45	78	0,5769

LAMPIRAN 3

Data Variabel Dewan Komisaris

Kode Emitmen	Dewan Komisaris		
	2015	2016	2017
BBCA	5	5	5
BBMD	3	4	4
BBNI	9	8	8
BBRI	8	8	12
BDMN	7	6	6
BMRI	8	8	8
BNGA	8	8	9
BNLI	8	8	8
BVIC	5	4	4
INPC	6	7	6
NISP	8	8	8

Data Variabel Dewan Direksi

Kode Emitmen	Dewan Direksi		
	2015	2016	2017
BBCA	10	11	6
BBMD	5	5	5
BBNI	9	10	10
BBRI	11	11	11
BDMN	7	9	7
BMRI	11	10	7
BNGA	9	10	11
BNLI	10	10	9
BVIC	5	5	5
INPC	7	6	8
NISP	10	10	10

Data Variabel Komite Audit

Kode Emitmen	Komite Audit		
	2015	2016	2017
BBCA	3	3	3
BBMD	3	3	3
BBNI	5	3	2
BBRI	6	6	6
BDMN	5	5	3
BMRI	5	6	6
BNGA	6	4	4
BNLI	3	4	2
BVIC	4	4	4
INPC	6	6	5
NISP	4	3	3

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	33	3.00	12.00	227.00	6.8788	1.93258
Dewan Direksi	33	5.00	11.00	280.00	8.4848	2.20966
Komite Audit	33	2.00	6.00	138.00	4.1818	1.30993
ICD Index	33	.50	.76	19.35	.5862	.06428
Valid N (listwise)	33					

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Komisaris	.368	2.718
Dewan Direksi	.416	2.405
Komite Audit	.820	1.220

b. Dependent Variable: ICD Index

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.269 ^a	.072	-.023	.06503	1.182

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ICD Index

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.510	.056		9.144	.000
Dewan Komisaris	-.001	.010	-.025	-.086	.932
Dewan Direksi	.004	.008	.138	.498	.622
Komite Audit	.012	.010	.235	1.189	.244

a. Dependent Variable: ICD Index

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.010	3	.003	.755	.528 ^a
Residual	.123	29	.004		
Total	.132	32			

a. Dependent Variable: ICD Index

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Model Summary^b

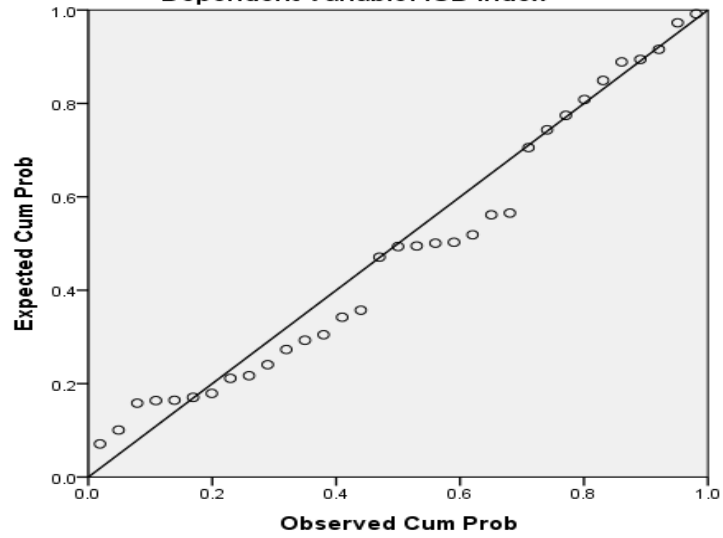
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.269 ^a	.072	-.023	.06503

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: ICD Index

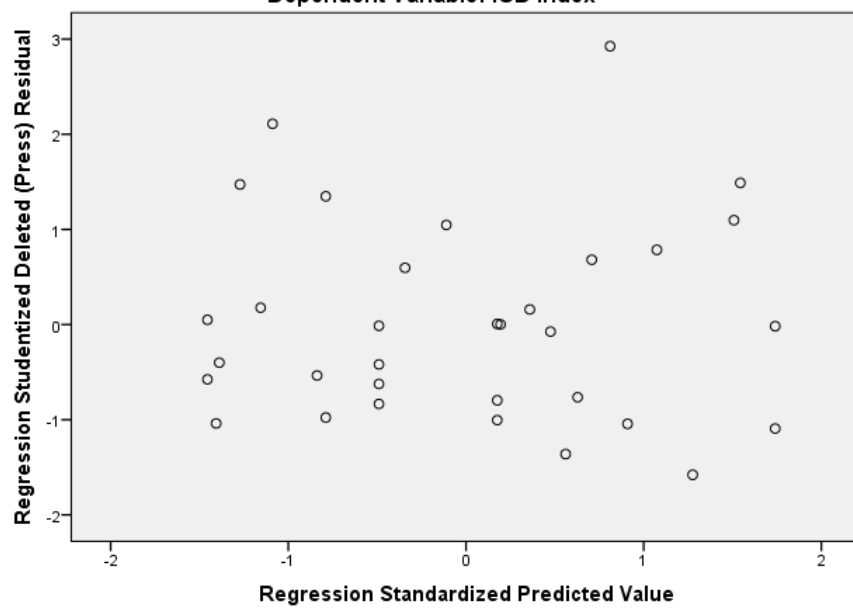
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ICD Index



Scatterplot

Dependent Variable: ICD Index



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama : Amalia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Februari 1998
4. Alamat : Jl. Ismailiyah No.84 , Kec. Medan Area
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. No.Telepon/Hp : 0857-6173-9369

Riwayat Pendidikan:

1. Tahun 2009 Lulus SD Negeri 060826 Medan
2. Tahun 2012 Lulus SMP Swasta Al-Washliyah-1 Medan
3. Tahun 2015 Lulus SMK Swasta Indonesia Membangun-2 Medan
4. Tahun 2019 Lulus S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara